

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 (dua) tinjauan pustaka berisi deskripsi mengenai teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, karakteristik PKL, jenis usaha, sifat pelayanan, bentuk sarana fisik berdagang, luas lapak usaha PKL, sifat pelayanan PKL, pola pelayanan PKL, waktu pelayanan PKL, serta faktor yang memengaruhi kriteria lokasi PKL dan sintesis teori.

2.1 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Gilbert dan Josef (2007) dalam Yusuf (2015), menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima atau disebut PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha dalam perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang sifatnya menetap ataupun tidak menetap pada area fasilitas sosial dan umum, prasarana perkotaan, bangunan milik swasta, atau bangunan milik pemerintah. PKL merupakan salah satu sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan (Riptek dalam Susilo, 2011). Sebagian PKL menempati lokasi yang tidak menetap dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang-ruang terbuka yang bersifat umum. Karakteristik cara kegiatan usaha PKL, di mana bentuk sarana usaha yang sederhana dan tradisional. Terdapat 2 (dua) faktor yang mendukung kemudahan perkembangan PKL di ruang publik, yaitu adanya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha PKL serta adanya kedekatan dan kemudahan komunikasi dengan sumber-sumber aktivitas formal (Susilo, 2011).

Menurut Duwit, dkk (2015), pedagang kaki lima merupakan orang yang melakukan aktivitas produksi (produksi barang, menjual barang, dan menyelenggarakan jasa) dengan menggunakan modal yang relatif sedikit. Selain itu, menurut Kartono (1980 dalam Wafirotin dkk, 2015) juga menjelaskan bahwa PKL pada umumnya memiliki modal kecil yang berjualan di pinggir jalan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha (Duwit dkk, 2015). Kegiatan usaha PKL dilakukan pada lokasi atau kawasan yang

dianggap strategis dan mencirikan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal. Dari dua sudut pandang tersebut, dapat diketahui bahwa PKL yang berjualan pada kawasan strategis ialah pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan raya, seperti trotoar atau pinggiran toko, taman, atau lokasi yang tidak adanya perizinan usaha dari pihak pemerintah (Widjajanti dalam Duwit, 2015).

Menurut Rolis (2013 dalam Maulidayah 2016), menjelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan bentuk perdagangan sektor informal yang keberadaannya tidak dapat dihindari, khususnya di negara-negara berkembang. Sedangkan menurut Rahayuni (2015), PKL menyebutkan sebagai penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah tersebut sependapat dengan Mashudi (2014) bahwa PKL adalah penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, yakni dua kaki pedagang dan ditambah tiga kaki gerobak (tigas roda atau dua roda dan satu kaki gerobak).

Dari pendapat beberapa ahli, terdapat keberagaman mengenai pengertian dari pedagang kaki lima, yaitu ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Diskusi Teori Pengertian Pedagang Kaki Lima

No.	Sumber Pustaka	Definisi Pedagang Kaki Lima
1.	Gilbert dan Josef Gulger (2007) dalam Yusuf (2015)	Pelaku usaha yang melakukan usaha dalam perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau menetap
2.	Riptek (2007) dalam Susilo (2017)	Salah satu sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan dengan cara tidak menetap dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang-ruang terbuka yang bersifat umum.
3.	Duwit (2015)	Orang yang melakukan aktivitas produksi (produksi barang, menjual barang, dan menyelenggarakan jasa) dengan menggunakan modal yang relatif sedikit, hal ini untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha, serta mencari lokasi atau kawasan berjualan yang dianggap strategis dan mencirikan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal.
4.	Kartono (1980) dalam Wafirotin dkk (2015)	PKL pada umumnya memiliki modal kecil yang berjualan di pinggir jalan
5.	Widjajanti (2015)	Pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan raya, seperti trotoar atau pinggiran toko, taman, atau lokasi yang tidak adanya perizinan usaha dari pihak pemerintah

No.	Sumber Pustaka	Definisi Pedagang Kaki Lima
6.	Rolis (2013)	Bentuk perdagangan sektor informal yang keberadaannya tidak dapat dihindari, khususnya dinegara-negara berkembang
7.	Rahayuni (2015) dan Mashudi (2014)	Penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, yakni dua kaki pedagang dan ditambah tiga kaki gerobak (tiga roda atau dua roda dan satu kaki gerobak).

**)Hasil Pustaka, 2020*

Dari definisi-definisi di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, bahwa pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL yang disampaikan oleh Rolis (2013) bentuk perdagangan sektor informal yang keberadaannya tidak dapat dihindari, khususnya dinegara-negara berkembang, lalu definisi tersebut dilengkapi oleh Riptek (2007 dalam Susilo 2017) di mana PKL merupakan salah satu sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan dengan cara tidak menetap dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang-ruang terbuka yang bersifat umum. Menurut Gilbert dan Josef Gulger (2007) menambahkan, bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, bangunan milik pemerintah dan/atau swasta. Selain itu, PKL juga ditemukan di pinggir jalan raya, seperti pinggiran toko, taman, ataupun lokasi yang tidak adanya perizinan usaha dari pihak pemerintah (Widjajanti, 2015).

PKL bukan hanya melakukan kegiatan usaha perdagangan, namun jugang melakukan aktivitas produksi (produksi barang, menjual barang, dan menyelenggarakan jasa) dengan menggunakan modal yang relatif sedikit, hal ini untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha, serta mencari lokasi atau kawasan berjualan yang dianggap strategis dan mencirikan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal (Duwit, 2015). Kartono (1980) juga menyepakati, bahwa PKL pada umumnya memiliki modal kecil dan berjualan di pinggir jalan. Dalam hal ini, menurut Rahayuni (2015) dan Mashudi (2014) sepakat menyebutkan bahwa PKL sebagai penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, maksudnya ialah dua kaki pedagang dan ditambah tiga gerobak (tiga roda atau dua roda dan satu kaki gerobak). Sehingga, dapat ditarik kesepahaman bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang banyak terdapat di negara-negara berkembang dan khususnya di perkotaan

yang melakukan kegiatan usaha dengan produksi barang, berjualan atau menyelenggarakan jasa yang dilakukan tidak menetap, serta dilakukan ruang publik, taman-taman, trotoar, pinggiran toko, ataupun lokasi yang tidak adanya perizinan usaha dari pihak pemerintah.

2.2 Karakteristik Aktivitas PKL

Menurut Adinda Sukma Novelia (2015), karakteristik aktivitas PKL dapat identifikasi berdasarkan beberapa aspek, diantaranya karakteristik PKL, jenis usaha PKL, sifat pelayanan PKL, bentuk sarana perdagangan PKL, pola penyebaran PKL, dan pola pelayanan aktivitas PKL. Selain itu, karakteristik lokasi aktivitas PKL dalam berdagang merupakan ciri khas atau identitas tersendiri yang dimiliki oleh suatu lokasi, di mana ciri-ciri tersebut dapat memengaruhi kegiatan atau aktivitas pada lokasi tersebut.

2.2.1 Karakteristik PKL

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.1, bahwa pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang banyak ditemukan pada wilayah perkotaan. Ciri-ciri karakteristik sektor informal sebagian besar merupakan karakteristik dari pedagang kaki lima. Berdasarkan pendapat An-Naf (1983 dalam Susilo, 2011), menyebutkan beberapa karakteristik dari PKL, yaitu :

1. Sebagai mata pencaharian utama;
2. Memiliki usia produktif;
3. Tingkat pendidikan yang rendah;
4. Pemandang;
5. Bekerja sebagai PKL telah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL, bekerja sebagai petani atau buruh;
7. Modal awal dari PKL itu sendiri;
8. Memiliki modal yang relatif rendah dan omzet penjualan relatif kecil;
9. Kurang mampu untuk mengolah atau memutar modal;
10. Pendapatan yang diperoleh relatif rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada daerah perkotaan; serta

Menurut Susilo (2011), Mashudi (2014), Duwit dkk (2015), dan Taufiq (2019) telah sepakat bahwa terdapat 3 (tiga) karakteristik yang merupakan ciri-ciri dari PKL itu sendiri, yaitu diantaranya :

1. PKL sebagian besar berjenis kelamin laki-laki;
2. PKL yang melakukan kegiatan usahanya pada usia produktif.

Di mana usia produktif yang dimaksudkan menurut Mashudi (2014) ialah PKL yang berusia di atas 25 tahun, Susilo (2011) berusia 25 tahun hingga 54 tahun, Duwit dkk (2015) 27 tahun hingga 36 tahun, sedangkan menurut Taufiq Ramdani (2019) PKL yang memiliki usia produktif pada umumnya.

3. Sebagian besar PKL memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah.

Tingkat pendidikan menengah ke bawah dapat meliputi tamat atau tidak tamat SD, tamat atau tidak tamat SMP, serta tamat atau tidak tamat SMA.

Dari ketiga karakteristik PKL, Mashudi (2014) menambahkan 5 (lima) karakteristik yang mencirikan PKL, yaitu PKL berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, pada umumnya pengalaman menjadi PKL dilakukan selama lebih dari 10 tahun, penyebab melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang kaki lima dikarenakan dampak dari PHK, PKL mendirikan kegiatan usaha dengan modal yang dimiliki relatif kecil, serta dilakukan kegiatan PKL dimulai pada waktu pagi hari hingga sore hari. Dilain sisi, menurut Sethurahman (1991) dan Naroth (1994) dalam Susilo (2011) melakukan kesepakatan, bahwa PKL yang merupakan salah satu sektor informal secara umum merupakan pendatang dan memiliki pendidikan yang rendah. Secara pribadi Sethurahman (1991) menambahkan, PKL memiliki ciri karakteristik yang tidak mempunyai keterampilan dan berasal golongan masyarakat ke bawah, serta menurut Naroth (1994), PKL memiliki modal yang relatif rendah, tidak semua barang dagangan adalah milik pribadi PKL yang berupa barang titipan, dan didominasi oleh PKL berusia produktif.

Menurut Kartono (1980 dalam Wafirotin dkk, 2015) bahwa PKL dalam melakukan usaha berdagang tidak menunjukkan waktu bekerja secara menetap dan dalam perdagangan dibantu oleh anggota keluarga atau dapat dikatakan sebagai "*family interprice*". Berbeda halnya menurut Susilo (2011), karakteristik PKL adalah sebagian besar berasal dari dalam kota dan sisanya berasal dari luar daerah, serta pekerjaan sebagai PKL merupakan mata pencaharian pokok. Sedangkan,

Duwit dkk (2015) mengungkapkan bahwa PKL sebagian besar merupakan pendatang dari luar kota. Banyaknya pendatang yang melakukan migrasi ke dalam kota dapat menimbulkan kepadatan penduduk yang semakin tinggi tiap tahunnya, sehingga semakin sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dan menimbulkan banyak pengangguran. Selain itu, karakteristik yang mencirikan sebagai PKL adalah memperoleh pendapatan pada setiap harinya dan sebagian besar memperoleh pendapatan tidak mencapai dua ratus ribu rupiah, serta pada umumnya PKL melakukan usaha telah lebih dari lima tahun lamanya.

Menurut Ramdani (2019) yang serupa dengan pendapat Mashudi (2014), bahwa karakteristik PKL memiliki modal usaha yang rendah. Menurut Ramdani (2019) menambahkan bahwa pendapatan usaha PKL yang dihasilkan lebih dari seratus ribu rupiah pada setiap harinya bergantung pada kondisi dan situasi lokasi tersebut. Berbeda dengan pendapat Nasta (2017), PKL menghasilkan pendapatan relatif rendah dan jika dilihat dari segi waktu, pola pelayanan PKL mengikuti waktu aktivitas kegiatan utama, yakni menjelang sore hari hingga malam hari sekira pukul 15.00 hingga pukul 24.00 wita atau pukul 17.00 hingga pukul 23.00. Selain itu, secara umum PKL yang berdagang cenderung mengelompok dan bersifat homogen dengan jenis kelompok usahanya. Sedangkan PKL yang berupa jasa pelayanan cenderung yang tidak berkelompok sesama jenis dan memiliki sifat membaaur dengan jenis lainnya. Dari pendapat beberapa ahli terkait karakteristik PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Diskusi Karakteristik PKL

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	An-Naf (1983) dalam Susilo (2011)	Karakteristik PKL	1. Mata Pencaharian 2. Usia 3. Tingkat Pendidikan 4. Asal PKL 5. Pekerjaan sebelum menjadi PKL 6. Modal 7. Pendapatan
2.	Mashudi (2014)	Karakteristik PKL	1. Jenis Kelamin 2. Usia 3. Tingkat pendidikan 4. Berkedudukan sebagai Kepala Rumah Tangga 5. Lamanya Bekerja 6. Penyebab Menjadi PKL 7. Modal 8. Waktu Bekerja

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
3.	Sethurahman (1991) dalam Susilo (2011)	Karakteristik PKL	1. Asal PKL 2. Tingkat Pendidikan 3. Keahlian berjualan 4. Pendapatan
4.	Naroth (1994) dalam Susilo (2011)	Karakteristik PKL	1. Asal PKL 2. Tingkat Pendidikan 3. Modal 4. Kepemilikan Barang Dagangan
5.	Kartono (1980) dalam Wafirotin dkk (2015)	Karakteristik PKL	1. Waktu Bekerja 2. Identitas Anggota Pekerja
6.	Susilo (2011)	Karakteristik PKL	1. Jenis kelamin 2. Usia 3. Tingkat pendidikan 4. Asal PKL 5. Mata pencaharian
7.	Duwit dkk (2015)	Karakteristik PKL	1. Jenis kelamin 2. Usia 3. Tingkat pendidikan 4. Asal PKL 5. Waktu perolehan pendapatan (hari/bulan) 6. Pendapatan 7. Lamanya bekerja
8.	Ramdani (2019)	Karakteristik PKL	1. Jenis kelamin 2. Usia 3. Tingkat pendidikan 4. Modal 5. Pendapatan
9.	Nasta (2017)	Karakteristik PKL	1. Pendapatan 2. Waktu bekerja 3. Berkelompok/ tidak

**)Hasil Pustaka, 2020*

Dari hasil pustaka beberapa sumber pustaka yang disajikan pada tabel di atas, terdapat irisan dari beberapa indikator terkait karakteristik PKL. Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa karakteristik PKL di suatu kota terdapat setidaknya 5 (lima) indikator yang mencirikan sebagai sektor informal, yaitu usia, tingkat pendidikan, pendapatan, modal, dan asal PKL, di mana secara jelas disebutkan oleh An-Naf (1983), Sethurahman (1991), Naroth (1994), Susilo (2011), Mashudi (2014), Duwit dkk (2015), dan Ramdani (2019). Terkait waktu bekerja yang tidak menentu pada PKL disepakati oleh Kartono (1980), Mashudi (2014), dan Nasta (2017). Sedangkan menurut pendapat Mashudi (2014) dan Duwit dkk (2015) adalah lama bekerja merupakan ciri dari PKL. Berbeda pendapat dengan An-Naf (1983) dan Susilo (2011), PKL sebagai mata pencaharian utama.

Terdapat beberapa indikator tambahan yang merupakan karakteristik PKL, yaitu menurut pendapat An-Naf (1983) bahwa PKL merupakan pekerjaan kedua setelah bekerja sebagai petani ataupun buruh serta menurut pendapat Mashudi (2014) bahwa PKL memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga dan menambahkan bahwa PKL merupakan dampak dari pekerjaan sebelumnya. Sethurahman (1991) menambahkan bahwa menjadi PKL merupakan salah satu keahlian dalam berjualan. Adapun pendapat dari Naroth (1994), PKL melakukan usaha dengan menjual barang dagangan milik orang lain. Menurut Kartono (1980) PKL dibantu oleh anggota keluarga dalam berusaha, sedangkan menurut Nasta (2017) PKL melakukan berjualan secara berkelompok dengan cara bekerja sama dan beberapa yang dilakukan secara individu. Disisi lain, menurut Duwit dkk (2015) PKL mencirikan waktu perolehan pendapatan pada setiap harinya.

2.2.2 Jenis Usaha PKL

Menurut McGee dan Yeung (1977 dalam Novelia, 2015) dan telah dilakukan penelitian oleh Novelia (2015), menjelaskan bahwa jenis usaha barang dan jasa yang didagangkan oleh PKL terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Makanan siap saji, yakni makanan yang sudah dimasak
2. Makanan yang tidak diproses dan bersifat semi olahan. Contoh makanan yang tidak diproses adalah daging, buah-buahan, sayur-sayuran. Contoh makananya bersifat semi olahan seperti beras.
3. Barang bukan makanan. Di mana pada jenis ini terdiri dari barang-barang diartikan dalam skala luas, lingkupannya dari tekstil hingga sejenis obat-obatan.
4. Menyelenggarakan jasa. Pada jenis ini terdiri dari beragam kegiatan aktivitas jasa yang dilakukan, seperti jasa perbaikan sol sepatu dan tukang cukur.

Menurut Kartono (1980 dalam Wafirotin dkk, 2015), menjelaskan bahwa PKL memiliki ciri khas dalam berusaha, yaitu diantaranya menyelenggarakan jasa, menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan, pendapat dari An-Naf (1983 dalam Susilo, 2011), secara umum PKL memperdagangkan jualan yang meliputi bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder lainnya.

Pada umumnya di negara-negara berkembang, sarana fisik perdagangan PKL sangat sederhana dan mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. PKL melakukan kegiatan usaha berdagang dengan menyesuaikan kondisi pada suatu kawasan. Contohnya pada kawasan perdagangan, hal ini mendorong PKL ini menyediakan jenis dagangannya, seperti minuman, makan, kelotong, pakaian, dan lainnya (Nasta, 2017). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, menurut Nasta (2017), bahwa jenis dagangan PKL terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu diantaranya sebagai berikut

1. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (*unprocessed and semi processed food*), seperti daging, buah dan sayuran, serta beras.
2. Makanan siap saji, makanan ataupun minuman yang telah dimasak dan dapat langsung disajikan.
3. Non makanan (*non foods*), seperti tekstil sampai dengan obat-obatan.
4. Jasa pelayanan (*services*) yang bersifat perorangan, seperti tukang membuat kunci, reparasi jam, dan lain-lain.

Selain itu, Nasta (2017) merincikan jenis usaha yang dilakukan oleh PKL, yaitu diantaranya sebagian besar jenis barang yang didagangkan berupa makanan, terutama ciri khas makanan pada kota tersebut, oleh-oleh atau souvenir (jenis dagangan baju dan aksesoris), serta minuman. PKL pada umumnya memilih barang dagangannya untuk didagangkan dengan mengikuti kegiatan utama di kawasan strategis tersebut.

Menurut Mashudi (2014), PKL melakukan kegiatan usaha, hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu sepatu sandal dan aksesoris elektronik, seperti VCD dan lainnya. Pendapat lain yang serupa dengan Mashudi (2014) disampaikan oleh Ramdani (2019) bahwa jenis usaha PKL terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya makanan dan minuman, aksesoris, pedagang elektronik (seperti VCD-kaset), pakaian atau konveksi, serta aksesoris. Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, menurut Bremen (1980 dalam Novelia, 2015), menjelaskan bahwa bentuk sarana fisik berdagang, meliputi penjual koran, penyemir sepatu, pengemis, penjaja barang, dan pengemudi becak.

Berbeda dengan pendapat Duwit dkk (2015), jenis usaha PKL terdiri dari sayur-mayur dan rempah-rempah, sembako, jasa, pernak-pernik, dan konveksi.

Sedangkan menurut Novelia (2015), jenis dagangan PKL dikelompokkan menjadi 11 kelompok, yaitu dapat berupa aksesoris, alas kaki, buah-buahan, VCD-kaset, kios rokok, makanan, minuman, pakaian, perabot rumah tangga, tambal ban, dan tas. Dari pendapat beberapa ahli terkait jenis usaha PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Diskusi Teori Jenis Usaha PKL

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	McGee dan Yeung (1977) dalam Novelia (2015)	Jenis Usaha PKL	1. Makanan siap saji 2. Makanan yang tidak diproses dan bersifat semi olahan 3. Barang bukan makanan 4. Jasa
2.	Kartini (1980) dalam Wafirotin dkk (2015)	Jenis Usaha PKL	1. Jasa 2. Makanan yang tidak diproses dan bersifat semi olahan 3. Minuman 4. Barang Bukan Makanan
3.	An-Naf (1983) dalam Susilo (2011)	Jenis Usaha PKL	1. Bahan Pangan 2. Bahan Sandang 3. Kebutuhan Sekunder lainnya
4.	Bremen (1980) dalam Novelia (2015)	Jenis Usaha PKL	1. Barang Bukan Makanan 2. Jasa
5.	Nasta (2017)	Jenis Usaha PKL	1. Makanan siap saji 2. Barang bukan makanan
6.	Mashudi (2014)	Jenis Usaha PKL	Barang bukan makanan
7.	Ramdani (2019)	Jenis Usaha PKL	1. Makanan siap saji 2. Barang bukan makanan
8.	Duwit dkk (2015)	Jenis Usaha PKL	1. Makanan siap saji 2. Makanan yang tidak diproses dan bersifat semi olahan 3. Barang bukan makanan 4. Jasa
9.	Novelia (2015)	Jenis Usaha PKL	1. Makanan siap saji 2. Makanan yang tidak diproses dan bersifat semi olahan 3. Barang bukan makanan 4. Jasa

**Hasil Pustaka, 2020*

Berdasarkan hasil pustaka yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapat dari beberapa pakar terkait jenis usaha PKL yang sesuai dengan penelitian ini saling menguatkan satu sama lain. Di mana menurut pendapat McGee dan Yeung (1977) dalam Novelia (2015), Duwit dkk (2015) dan Novelia (2015) telah sepakat bahwa jenis usaha PKL terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu makanan siap saji, makanan yang tidak diproses dan bersifat semi lahan, barang

bukan makanan, dan jasa. Berbeda dengan pendapat Kartono (1980), menjelaskan bahwa jenis usaha PKL terbagi menjadi makanan yang tidak diproses dan semi olahan, minuman, barang bukan makanan, dan jasa. Sedangkan menurut Nasta (2017) dan Ramdani (2019) hanya sepakat 2 (dua) jenis usaha PKL yaitu makanan siap saji dan barang bukan makanan. Berbeda dengan pendapat lainnya, bahwa pendapat dari Bremen (1980) dan Mashudi (2014), jenis usaha PKL hanya barang bukan makanan. Pendapat Bremen (1980) menambahkan bahwa jasa termasuk dari jenis usaha PKL. Pendapat lain yang berbeda dengan pendapat sebelumnya, yaitu disampaikan oleh An-Naff (1983) bahwa jenis usaha PKL dapat berupa bahan pangan, sandang, dan kebutuhan sekunder lainnya.

2.2.3 Bentuk Sarana Fisik Berdagang

Bentuk sarana fisik berdagang salah satu yang menentukan karakteristik dari aktivitas PKL. Menurut Kartono (1980 dalam Wafirotin dkk, 2015) menjelaskan bahwa PKL menjajakan barang dagangannya dengan melakukan gelaran tikar, dapat mempergunakan meja, kereta dorong, ataupun mendirikan kios-kios kecil pada lokasi yang dianggap strategis. Sependapat dengan sebelumnya, menurut Alisjahbana (2006 dalam Faradina, 2019) bahwa PKL berjualan di atas tikar yang menggunakan gerobak dorongan kecil dan kios kecil. Sedangkan, menurut Waworoento (1973) dalam Novelia (2015), bentuk sarana fisik berdagang yang digunakan oleh pedagang kaki lima terbagi menjadi 6 (enam) sarana yaitu diantaranya sebagai berikut

1. Gerobak yang dapat terdiri dari gerobak yang beratap dan tidak beratap.
2. Pikulan/keranjang dapat digunakan oleh PKL dengan cara berkeliling pada kawasan tersebut ataupun semi menetap.
3. Tenda, di mana dapat termasuk gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja, serta menggunakan terpal sebagai atapnya.
4. Kios, yakni menggunakan papan atau batu bata yang bersifat semi permanen.
5. Gelaran/alas, pedagang bentuk sarana ini dapat berupa alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya.
6. Meja yang merupakan kategori dari meja yang beratap dan jongko, serta sifatnya sebagai sarana menetap.

Selain itu, kebutuhan sarana berdagang PKL lebih dirincikan oleh Novelia (2015), yaitu sebagai berikut

1. PKL aksesoris, meliputi gerobak, tenda, meja, dan rak
2. PKL alas kaki, meliputi gerobak, tenda, gelaran, dan rak
3. PKL buah, meliputi gerobak, tenda, meja, dan mobil *pick up*
4. PKL kaset VCD, meliputi gerobak, tenda, dan rak
5. PKL kios rokok, meliputi gerobak dan tenda
6. PKL makanan, meliputi gerobak, tenda, gelaran, meja, mobil *pick up*, dan sepeda motor
7. PKL minuman, meliputi gerobak, tenda, gelaran, dan gerobak motor
8. PKL pakaian, meliputi gerobak, tenda, meja, dan mobil *pick up*
9. PKL perabot rumah tangga, meliputi gerobak, tenda, gelaran, meja, rak, dan mobil *pick up*
10. PKL tambal ban, meliputi gerobak, tenda, dan gelaran
11. PKL tas, meliputi gerobak, tenda, dan rak

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, menurut Duwit dkk (2015), sarana fisik yang digunakan oleh PKL untuk melakukan kegiatannya, yaitu diantaranya menggunakan warung tenda bersifat sementara dan permanen, gelaran dasar, gerobak atau kereta dorong, pikulan/keranjang, dan kios. Berbeda dengan pendapat Duwit dkk (2015), menurut Nasta (2017) bentuk sarana fisik yang digunakan oleh PKL terbagi menjadi dua jenis, yaitu

1. Mayoritas PKL menggunakan gerobak dan ditunjang dengan fasilitas tempat duduk dapat berupa meja dan kursi untuk menyajikan langsung makanan yang telah dipesan.
2. Terkadang PKL hanya menggunakan meja yang cukup lebar dan rak-rak untuk menggelar dagangannya, baik yang dapat diangkut maupun menetap pada lokasi tersebut..

Disisi lain, menurut Perdana (2020), bahwa PKL berdominan menggunakan sarana gerobak yang dianggap lebih mudah untuk melakukan usaha berjualan. Selain itu, terdapat sarana lainnya seperti tikar dan alat masak. Dari pendapat beberapa ahli yang telah melakukan sebuah penelitian terkait sarana fisik

berdagang PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Diskusi Teori Bentuk Sarana Fisik Berdagang

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	Menurut Kartono (1980) dalam Wafirotin dkk (2015)	Bentuk Sarana Fisik Berdagang	1. Gelaran 2. Meja 3. Gerobak 4. Kios
2.	Alisjahbana (2006) dalam Faradina, (2019)	Bentuk Sarana Fisik Berdagang	1. Gelaran 2. Gerobak 3. Kios
3.	Novelia (2015)	Bentuk Sarana Fisik Berdagang	1. Gerobak 2. Tenda 3. Gelaran 4. Rak 5. Meja 6. Mobil <i>pick up</i> 7. Sepeda motor
4.	Duwit dkk (2015)	Bentuk Sarana Fisik Berdagang	1. Tenda 2. Gelaran 3. Gerobak atau kereta dorong 4. Pikulan atau keranjang 5. Kios
5.	Nasta (2017)	Bentuk Sarana Fisik Berdagang	1. Gerobak dan ditunjang dengan meja dan kursi 2. Meja 3. Rak
6.	Perdana (2020)	Bentuk Sarana Fisik Berdagang	Gerobak

*)*Hasil Pustaka, 2020*

Dari diskusi teori yang disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa bentuk sarana fisik berdagang PKL yang telah disepakati satu sama lain oleh keenam (ke-6) pakar, yaitu gerobak. Kemudian, bentuk sarana lainnya ditambahkan oleh pakar tersebut yang memiliki perbedaan satu sama lain dan saling melengkapi. Menurut pendapat Kartono (1980), Alisjahbana (2006), Novelia (2015), dan Duwit dll (2015) sepakat bahwa sarana yang digunakan adalah gelaran tikar. Selain itu, pendapat dari Kartono (1980) menambahkan sarana lainnya, meliputi meja dan kios. Pendapat lainnya yang serupa, disampaikan oleh Alisjahbana (2006) bahwa sarana fisik berdagang yang digunakan PKL adalah kios. Kemudian, dari pendapat Novelia (2015) menjelaskan bahwa bentuk sarana fisik berdagang lainnya adalah tenda, rak, meja, mobil *pick up* dan sepeda motor, sedangkan dari pendapat Duwit dkk (2015) menambahkan sarana fisik berdagang PKL mencakup tenda, pikulan

atau keranjang, dan kios. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, mengungkapkan bahwa sarana berdagang PKL adalah gerobak yang ditunjang menggunakan meja dan kursi. Kemudian beliau menambahkan, sarana lainnya meliputi meja dan rak.

2.2.4 Luas Lapak Usaha PKL

Luas lapak pada usaha masing-masing PKL bervariasi dan tergantung pada besaran tempat yang dibutuhkan PKL dalam kegiatan usaha dagangannya (Novelia, 2015). Menurut Novelia (2015), luas lapak terbagi menjadi 6 luasan dalam satuan meter persegi (m^2), yaitu diantaranya $<4 m^2$, $4 m^2 - 8 m^2$, $8 m^2 - 12 m^2$, $12 m^2 - 16 m^2$, $16 m^2 - 20 m^2$, dan $20 m^2 - 25 m^2$. Berbeda halnya dengan pendapat sebelumnya, menurut Neufferet (1991) dalam Aggeriani (2016) menjelaskan bahwa ukuran luas memiliki ukuran bervariasi, yaitu $2 m^2$, $20 m^2$, $25 m^2$, $48 m^2$, dan $120 m^2$ pada masing-masing kebutuhan ruang jenis usaha PKL. Sejalan dengan pendapat Neufferet (1991), Rasdiana (2013) mengungkapkan bahwa luas lapak usaha didasarkan pada ukuran jenis usaha dagangan PKL, yaitu luas lapak pada jenis usaha makanan siap saji berkisar $2 m^2$, $6 m^2$, dan $9 m^2$, serta luas lapak pada jenis usaha barang bukan makanan dan jasa masing-masing seluas $2 m^2$. Selain itu, menurut Saputra dkk (2019) menjelaskan bahwa ukuran luas lapak dikategorikan menjadi 4, yaitu $<1 m^2$, $1 m^2 - 2 m^2$, $2 m^2 - 3 m^2$, dan $>4 m^2$. Dari beberapa pendapat yang telah melakukan sebuah penelitian terkait luasan lapak usaha PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Diskusi Teori Luas Lapak Usaha PKL

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	Novelia (2015)	Luas Lapak Usaha PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. $<4 m^2$ 2. $4 m^2 - 8 m^2$ 3. $8 m^2 - 12 m^2$ 4. $12 m^2 - 16 m^2$ 5. $16 m^2 - 20 m^2$ 6. $20 m^2 - 25 m^2$
2.	Neufferet (1991) dalam Aggeriani (2016)	Luas Lapak Usaha PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. $2 m^2$ 2. $20 m^2$ 3. $25 m^2$ 4. $48 m^2$ 5. $120 m^2$
3.	Rasdiana (2013)	Luas Lapak Usaha PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. $2 m^2$ 2. $6 m^2$ 3. $9 m^2$
4.	Saputra dkk (2019)	Luas Lapak Usaha PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. $<1 m^2$ 2. $1 m^2 - 2 m^2$

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
			3. $2 \text{ m}^2 - 3 \text{ m}^2$ 4. $>4 \text{ m}^2$

*)Hasil Pustaka, 2021

Dari diskusi teori yang disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa luas lapak usaha PKL yang disampaikan oleh beberapa pakar berbeda-beda. Mengenai pendapat Novelia (2015) terkait luas lapak dari kategori $<4 \text{ m}^2$ hingga 25 m^2 . Sedangkan, pendapat Neufferet (1991) dalam Aggeriani (2016) mengkategorikan luas lapak dari 2 m^2 hingga 120 m^2 . Menurut Rasdiana (2013), luas lapak hanya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 2 m^2 , 6 m^2 , dan 9 m^2 . Berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya, menurut Saputra dkk (2019) luas lapak terbagi menjadi 4 kategori, yaitu dari $<1 \text{ m}^2$ hingga $>4 \text{ m}^2$.

2.2.5 Sifat Pelayanan PKL

Menurut Gilbert dan Josef Gulger (2007) dalam Yusuf (2015), sifat pelayanan PKL dalam usaha perdagangannya yang bersifat tidak menetap. Sedangkan, menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Safitri (2015), sifat pelayanan PKL terbagi menjadi 3 (dua) unit yang digolongkan menjadi unit PKL yang tidak menetap dengan menunjukkan sarana fisik usaha dagangan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, unit PKL keliling, dan unit PKL setengah menetap dengan menetap secara sementara yang kemudian bergerak setelah waktu berjualan selesai. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Duwit dkk (2015), Nasta (2017), serta Perdana dkk (2020) telah sepakat bahwa, PKL terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat pelayanannya, yaitu diantaranya sebagai berikut

1. Sarana Pedagang yang Menetap (*static*)

Pedagang yang menetap merupakan bentuk pelayanan pedagang yang mempunyai sifat menetap pada berbagai lokasi tertentu, sehingga pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke lokasi pedagang tersebut. Sarana fisik pedagang yang menetap dapat berupa kios ataupun gerobak beratap. Pedagang yang menetap bersifat sementara yang hanya pada periode tertentu, di mana waktu yang memungkinkan kondisi datangnya jumlah pembeli atau konsumen yang cukup besar.

2. Pedagang yang Tidak Menetap atau Berpindah

PKL berpindah merupakan bentuk pelayanan pedagang akan menetap hanya pada satu waktu tertentu selama lokasi tersebut dapat menguntungkan bagi PKL.

Dari beberapa pendapat yang telah melakukan sebuah penelitian terkait sifat pelayanan PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Diskusi Teori Sifat Pelayanan PKL

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	Gilbert dan Josef Gulger (2007) dalam Yusuf (2015)	Sifat Pelayanan PKL	Pedagang yang tidak menetap
2.	Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Safitri (2015)	Sifat Pelayanan PKL	1. Sarana pedagang yang menetap 2. Pedagang yang tidak menetap atau berpindah 3. Pedagang yang semi menetap
3.	Duwit dkk (2015)	Sifat Pelayanan PKL	1. Sarana pedagang menetap 2. Pedagang yang tidak menetap atau berpindah
4.	Nasta (2017)	Sifat Pelayanan PKL	1. Sarana pedagang menetap 2. Pedagang yang tidak menetap atau berpindah
5.	Perdana dkk (2020)	Sifat Pelayanan PKL	1. Sarana pedagang menetap 2. Pedagang yang tidak menetap atau berpindah

**)Hasil Pustaka, 2020*

Berdasarkan hasil pustaka yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapat dari beberapa pakar terkait sifat pelayanan PKL yang sesuai dengan penelitian ini saling menguatkan satu sama lain. Duwit dkk (2015), Nasta (2017), dan Perdana dkk (2020) memiliki persamaan bahwa sifat pelayanan pada PKL meliputi sarana pedagang menetap dan pedagang yang tidak menetap atau berpindah. Kemudian, pendapat Mc.Gee dan Yeung (1977) menambahkan pedagang yang semi menetap termasuk sifat dari pelayanan PKL. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Gilbert dan Josef Gulger (2007) memiliki pendapat bahwa sifat pelayanan dari PKL hanya meliputi pedagang yang tidak menetap.

2.2.6 Pola Pelayanan Aktivitas PKL

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Safitri (2015), menjelaskan PKL melakukan usaha berjualan pada lokasi yang sering dikunjungi orang, seperti pasar pabrik, terminal, dan daerah komersial, yakni daerah pinggir jalan. Sedangkan

menurut An-Naf (1983 dalam Susilo, 2011), Hart (1985 dalam Widjajanti, 2013), Shirvani (1985 dalam Novelia, 2015) dan Taufik (2016) melakukan kesepakatan, bahwa PKL memilih tempat untuk berdagang pada bahu jalan atau trotoar.

Menurut Duwit dkk (2015), Maulidiyah dan Hertiari Idajati (2016), dan Rahayuni (2015) telah sepakat pola pelayanan aktivitas PKL menggunakan trotoar jalan, tempat parkir, dan badan jalan. Menurut Duwit dkk (2015) menambahkan tempat usaha PKL dilakukan di depan pertokoan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Rahayuni (2015) menambahkan lokasi pelayanan yang digunakan oleh PKL dengan cara berada pada kawasan pada ruang publik. Dari pendapat beberapa ahli yang telah melakukan sebuah penelitian terkait pola pelayanan aktivitas PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Diskusi Teori Pola Pelayanan Aktivitas PKL

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Safitri (2015)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	Trotoar Jalan
2.	An-Naf (1983) dalam Susilo (2011)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	Trotoar Jalan
3.	Hart (1985) dalam Widjajanti (2013)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	Trotoar Jalan
4.	Shirvani (1985) dalam Novelia (2015)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	Trotoar Jalan
5.	Taufik (2016)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	Trotoar Jalan
6.	Duwit dkk (2015)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	1. Trotoar jalan 2. Tempat parkir 3. Badan jalan 4. Depan pertokoan
7.	Maulidiyah dan Hertiari Idajati (2016)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	1. Trotoar jalan 2. Tempat parkir 3. Badan jalan 4. Depan pertokoan
8.	Rahayuni (2015)	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	1. Trotoar jalan 2. Tempat parkir 3. Badan jalan 4. Kawasan ruang publik

**)Hasil Pustaka, 2020*

Dari beberapa hasil pustaka yang disajikan pada tabel di atas, terdapat beberapa variabel mengenai pola pelayanan aktivitas PKL yang saling sepakat satu sama lain, yaitu diantaranya trotoar jalan, tempat parkir, dan badan jalan.

Kemudian, dari pendapat Duwit dkk (2015) dan Maulidiyah (2016) menambahkan yang termasuk pola pelayanan aktivitas PKL adalah berada di depan pertokoan. Berbeda dengan Rayani (2015) yang menambahkan termasuk pola pelayanan aktivitas PKL adalah dengan berada pada kawasan ruang publik. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut pendapat Mc. Gee dan Yeung (1977), An-Naf (1983), Hart (1985), dan Shirvani (1985) melakukan kesepakatan satu sama lain, bahwa pola pelayanan aktivitas pada PKL hanya terdapat pada area trotoar jalan.

2.2.7 Waktu Pelayanan PKL

Menurut McGee dan Yeung (1977) dalam Rasdiana (2013), penentuan periode waktu pelayanan PKL didasarkan pada perilaku kegiatan aktivitas lokasi. Mengenai waktu pelayanan berdagang PKL berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan jenis aktivitas kegiatan di sekitarnya, yakni lokasi yang dekat dengan pusat perbelanjaan berbeda dengan lokasi yang dengan dengan kawasan rekreasi (Bromley dalam Novelia, 2015). Menurut Maulidiyah dan Hertiaridajati (2016) menjelaskan bahwa waktu pelayanan PKL terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sore hingga malam hari, malam-pagi hari, dan malam-siang hari. Sedangkan, menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Susilo (2011), waktu berjualan PKL antara waktu pagi, waktu sore dan malam hari. Kemudian, Novelia (2015) mendetailkan waktu berdagang PKL yang bervariasi, yaitu pagi hari, pagi-sore hari, pagi-malam hari, dan sore-malam hari (pukul 05.00-09.00, 08.00-16.00, 09.00-23.00, 16.00-23.00, dan 18.00-24.00). Serupa dengan pendapat sebelumnya, menurut Rasdiana (2013) waktu operasional pelayanan PKL, diantaranya diantaranya pagi hari, pagi-sore hari, sore-malam hari, dan siang-malam hari (pukul 07.00-11.00, 08.00-18.00, 16.00-22.00, 15.00-21.00, 16.00-21.00, dan 16.00-20.00). Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Nasta (2017) menjelaskan bahwa waktu pelayanan yang dibutuhkan PKL terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu sore hari, sore-malam hari, dan malam hari (pukul 15.00-17.00, 17.00-21.00, dan 21.00-23.00). Dari pendapat beberapa ahli yang telah melakukan sebuah penelitian terkait waktu pelayanan PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Diskusi Teori Waktu Pelayanan PKL

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	Maulidiyah dan Hertiaridajati (2016)	Waktu Pelayanan PKL	1. Sore-malam hari 2. Malam-pagi hari 3. Malam-siang hari
2.	Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Susilo (2011)	Waktu Pelayanan PKL	1. Pagi hari 2. Sore hari 3. Malam hari
3.	Novelia (2015)	Waktu Pelayanan PKL	1. Pagi hari 2. Pagi-sore hari 3. Pagi-malam hari 4. Sore-malam hari
4.	Rasdiana (2013)	Waktu Pelayanan PKL	1. Pagi hari 2. Pagi-sore hari 3. Sore-malam hari 4. Siang-malam hari
5.	Nasta (2017)	Waktu Pelayanan PKL	1. Sore hari 2. Sore-malam hari 3. Malam hari

**)Hasil Pustaka, 2021*

Berdasarkan hasil pustaka yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapat dari beberapa pakar terkait waktu pelayanan PKL yang sesuai dengan penelitian ini saling melengkapi satu sama lain, yaitu dengan kesimpulannya PKL berdominan melakukan usaha dagangannya pagi, sore, dan/atau malam hari. Pada waktu pelayanan PKL sore-malam hari disepakati oleh Maulidiyah (2016), Novelia (2015), dan Nasta (2017). Pada waktu pelayanan PKL hanya pada pagi hari disepakati oleh Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Susilo (2011), Novelia (2015), dan Nasta (2017). Pada waktu pelayanan PKL pada sore hari dan malam hari disepakati oleh Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Susilo (2011) dan Nasta (2017). Sedangkan, pada waktu pelayanan PKL pada pagi-sore hari disepakati oleh Rasdiana (2013) dan Nasta (2017).

2.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kriteria Lokasi PKL

Menurut Catanese (2006 dalam Nasta, 2017) yang menjelaskan bahwa faktor utama dalam memengaruhi kriteria PKL adalah dilihat dari segi aksesibilitas, yakni lokasi yang mudah dijangkau oleh pengunjung, terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi, serta berada di pusat kota. Namun, menurut Hamdan (2017), memaparkan beberapa faktor-faktor yang dapat memengaruhi kriteria lokasi PKL berdasarkan preferensi pedagang, yaitu diantara sebagai berikut

- www.itk.ac.id
1. Aksesibilitas, yaitu lokasi yang dapat dilihat dan mudah dijangkau pembeli dagangan pedagang kaki lima, serta mudah dijangkau sarana transportasi umum,
 2. Visibilitas, yaitu kemudahan pelanggan untuk melihat pedagang dan kondisi lingkungan yang indah dan menarik,
 3. Interaksi PKL dengan lingkungan sekitarnya, seperti kegiatan pendidikan, kegiatan perdagangan dan jasa, dan kegiatan perkantoran,
 4. Tingkat keramaian seperti terdapat kegiatan wisata dan terdapat konsentrasi penduduk yang tinggi yang berada disekitar pedagang kaki lima

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Susilo (2011) faktor-faktor yang memengaruhi kriteria lokasi PKL adalah sebagian besar lokasi tempat untuk berdagang, disebabkan beberapa faktor diantaranya

1. Keuntungan lokasi, yaitu diantaranya mudah untuk memasarkan barang dagangannya, lebih cepat melakukan perputaran modal, dan harga beli/sewa kios di pasar dianggap mahal; serta
2. Tingkat keramaian, seperti lokasi yang strategis.
3. Aksesibilitas, seperti fungsi jalan

Sesuai dengan Hamdan (2017) yang disampaikan oleh Duwit dkk (2015), bahwa penentuan lokasi PKL diantaranya yaitu

1. Tingkat keramaian, yakni pada lokasi yang strategis
2. Visibilitas, yakni kondisi lokasi dan luas lokasi meliputi layak untuk ditempati berdagang, aman, tertib dan stabil
3. Aksesibilitas, yaitu diantaranya jarak lokasi tempat usaha dekat dengan tempat tinggal, yakni sekitar 0,5 km sampai dengan lebih dari 2 km
4. Keuntungan lokasi, yaitu adanya penguatan kelembagaan dan tingginya pola pergerakan masyarakat atau pengunjung pada suatu lokasi.
5. Retribusi, yaitu biaya sewa tempat berjualan yang murah

Sedangkan menurut Nasta (2017) yang beberapa sependapat dengan sebelumnya, faktor-faktor yang memengaruhi kriteria lokasi PKL meliputi

1. Tingkat keramaian, yaitu lokasi yang ramai akan pengunjung sangat diminati oleh PKL, dikarenakan sebagai potensi untuk berjualan. Lokasi yang

memiliki tingkat keramaian yang tinggi, sebagian besar diminati oleh PKL dengan jenis makanan dan minuman.

2. Aksesibilitas, yaitu lokasi berdagang PKL berdekatan dengan tempat tinggal PKL.
3. Retribusi, yaitu tidak adanya biaya retribusi yang dikeluarkan oleh PKL pada suatu lokasi yang merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh oleh PKL itu sendiri.

Berbeda dengan Maulidiyah dan Hertiaridajati (2016), faktor-faktor yang memengaruhi kriteria lokasi PKL yaitu dari aspek aksesibilitas, retribusi, serta interaksi PKL dengan lingkungan. Lokasi berdagang yang memiliki tingkat keramaian tinggi, yakni meliputi

1. Visibilitas, yakni berjualan dekat dengan jalan raya dan mudah terlihat
2. Interaksi PKL dengan lingkungan yang mencakup
 - a. Dekat dengan kegiatan masyarakat, yaitu lokasi berdagang yang dekat dengan kegiatan masyarakat sangat diminati oleh PKL, hal tersebut akan menarik perhatian pengunjung untuk melihat barang dagangan yang ditawarkan oleh PKL tersebut.
 - b. Dekat dengan permukiman penduduk, yaitu lokasi yang berdagang yang baru akan lebih menguntungkan PKL jika lokasi tersebut dekat dengan permukiman penduduk.
 - c. Dekat dengan terminal/stasiun, yaitu terdapat banyak pengunjung dari dalam kota atau bahkan pengunjung dari luar kota yang mungkin tertarik untuk mengunjungi lokasi berdagang PKL. Hal tersebut juga akan menguntungkan pengunjung yang akan berkunjung ataupun telah berkunjung ke lokasi berdagang PKL tersebut agar tidak susah mendapatkan angkutan umum yang sesuai dengan tujuannya.
 - d. Dekat dengan kawasan yang terdapat aktivitas formal, seperti aktivitas perkantoran, pertokoan, sekolah, rumah sakit dan jasa
3. Aksesibilitas
 - a. Dekat dengan tempat tinggal, dikarenakan kedekatan lokasi berdagang dengan tempat tinggal akan menghemat biaya transportasi.

- b. Lokasi berdagang yang mudah untuk dijangkau transportasi umum akan memudahkan pengunjung dan pedagang untuk menuju ke lokasi tersebut.
- c. Memiliki akses keluar dan masuk, yakni kelancaran akses keluar dan masuk lokasi berdagang sangat menunjang pedagang itu sendiri, dengan adanya kelancaran tersebut maka kenyamanan pengunjung pun terjamin
- d. Lahan parkir, yakni ketersediaan lahan parkir sangat dibutuhkan untuk pengunjung agar pengunjung merasa aman dan nyaman untuk memarkirkan kendaraannya
4. Retribusi
- a. Harga sewa lahan/kios, yaitu salah satu yang dapat berpengaruh dalam kriteria lokasi PKL. Harga sewa kios yang sesuai dengan kemampuan PKL dapat menunjang PKL dan tidak membebankan PKL.
- b. Harga sewa kios yang tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau PKL, maka PKL akan mau direlokasi dan tidak akan kembali ke lokasi berdagang yang telah ditertibkan
- c. Penarikan retribusi sangat berpengaruh dengan lokasi berdagang PKL. Dalam hal ini, lokasi PKL dalam melakukan usaha berdagang dapat terlihat lebih bersih, rapi, dan sifatnya tertib. Selain itu, sebagian besar pelaku PKL tidak keberatan apabila diberikan biaya retribusi. Kemudian, Agus Susilo (2011) menambahkan bahwa biaya penarikan retribusi setiap harinya, yaitu berkisar Rp.1000 hingga >Rp.3.000.
5. Kebutuhan Ruang untuk Berdagang
- a. Pengelompokkan jenis barang dagangan, yakni pengelompokkan jenis barang dagangan yang sama akan memudahkan pengunjung dan tempat berdagang akan terlihat lebih rapi.
- b. Luas tempat berdagang, yakni pada kawasan PKL dengan disamaratakan luasan untuk berdagang maka tempat berjualan akan terlihat lebih rapi dan tertib.
6. Lokasi berada di tingkat keramaian yang cukup tinggi, yakni lokasi yang ramai akan pengunjung dan kawasan yang digunakan berbagai kegiatan,

seperti tempat olahraga, tempat rekreasi, tempat berkumpul, serta dapat diadakannya konser.

Adapun tempat rekreasi merupakan tempat yang dapat meluangkan waktunya di suatu tempat yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tempat rekreasi juga termasuk tempat bersantai dan berkumpul bersama keluarga (Dewi, 2010). Sedangkan, tempat berkumpul tidak semua termasuk bagian dari tempat rekreasi, namun sifatnya lebih mengarah secara umum dan milik publik, seperti taman, jalan kota, taman, tempat keagamaan, dan lain sebagainya (Dewi, 2010).

Selain pada lokasi strategis, penentuan pada lokasi PKL salah satunya mencakup utilitas penunjang, yaitu diantaranya ketersediaan drainase, jaringan air bersih, dan ketersediaan pelayanan listrik.

1. Ketersediaan tempat pembuangan sampah, yakni lokasi berdagang dengan ketersediaan tempat sampahnya mencukupi lokasi berdagang PKL akan tetap bersih.
2. Ketersediaan drainase, yakni adanya jaringan drainase maka pedagang yang memiliki limbah cair tidak akan membuang limbah dagangannya kesembarang tempat agar tidak menyebabkan genangan dan lokasi berdagang yang becek.
3. Ketersediaan jaringan air bersih, yakni sebagian besar lokasi PKL minimnya penyediaan air bersih, sehingga untuk merelokasi PKL perlunya penyediaan air bersih yang mudah dijangkau dan didapatkan oleh PKL dalam melakukan berdagang.
4. Ketersediaan pelayanan jaringan listrik, bahwa ketersediaan jaringan listrik akan dibutuhkan oleh PKL yang berjualan hingga malam hari dan PKL yang berjualannya dimulai pada malam hari.

Disisi lain, menurut Rahayuni (2015), terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi lokasi pedagang kaki lima, yaitu

1. Interaksi PKL dengan lingkungan, yaitu dekat dengan kawasan perumahan, dekat dengan pusat pendidikan, terdapat aktivitas perkantoran, pertokoan, sekolah, rumah sakit serta jasa.

2. Memiliki tingkat visibilitas yang tinggi yang dapat memberikan kemudahan pembeli untuk mencapai lokasi PKL
3. Berada pada lokasi yang memiliki tingkat keramaian yang tinggi, seperti lokasi yang strategis, seperti olahraga, tempat rekreasi dan berkumpul, serta tempat yang dapat diadakannya konser. Pendapat Umsiani (2019) menambahkan, bahwa suatu lokasi menjadi strategis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya berada di pusat perkotaan, mudah dijangkau transportasi umum, tingkat aksesibilitas lalu lintas yang tinggi, dan kelancaran arus pejalan kaki. Lokasi yang strategis dapat menarik pengunjung untuk mendatangi lokasi tersebut dan hal ini dapat memengaruhi tingkat pendapatan pedagang yang berdagang di lokasi tersebut.

Berbeda dengan pendapat Rahayuni, menurut Novelia (2015), terdapat 6 (enam) faktor yang memengaruhi lokasi pedagang kaki lima, yaitu

1. Sebagian besar PKL menempati lokasi untuk melakukan kegiatan usaha dengan adanya ketersediaan pelayanan utilitas, seperti listrik, air bersih, dan limbah.
2. PKL memilih lokasi pada fungsi jalan yang dapat memungkinkan untuk dilakukannya transaksi dan dilalui banyak orang maupun kendaraan atau memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, serta dapat dilalui oleh jalur angkutan umum dan lokasi dekat dengan lahan parkir.
3. PKL memilih lokasi yang ramai dan memiliki tingkat kunjungan tinggi yang akan menghasilkan pendapatan yang tinggi
4. Lokasi berada di kawasan ruang publik yang memiliki ketersediaan ruang untuk para PKL, seperti jenis dagangan, sarana berdagang, luas lapak, waktu pelayanan berdagang yang tepat
5. Lokasi yang dekat dengan kegiatan formal
6. Lokasi PKL yang dapat mendukung untuk dijadikannya tempat berdagang dalam satu kelompok atau sejenis.

Dari pendapat beberapa ahli yang telah melakukan sebuah penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kriteria lokasi PKL, maka dapat dikomparasikan pada tabel diskusi teori sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Diskusi Teori Faktor yang Memengaruhi Kriteria Lokasi

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	Catanese (2006) dalam Nasta (2017)	Aksesibilitas	1. Lokasi mudah dijangkau 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi
		Tingkat Keramaian	Lokasi yang strategis berada di pusat kota
2.	Hamdan (2017)	Aksesibilitas	1. Lokasi PKL mudah dijangkau pembeli 2. Mudah dijangkau sarana transportasi umum
		Visibilitas	1. Kemudahan pelanggan untuk melihat pedagang 2. Kondisi lingkungan yang indah dan menarik
		Interaksi PKL dengan Lingkungan Sekitarnya	1. Kegiatan pendidikan 2. Kegiatan perdagangan dan jasa 3. Kegiatan perkantoran
		Tingkat Keramaian	1. Kegiatan wisata 2. Konsentrasi penduduk yang tinggi
3.	Susilo (2011)	Keuntungan Lokasi	Mudah untuk memasarkan barang dagangannya
		Tingkat Keramaian	Lokasi strategis
		Aksesibilitas	Fungsi jalan
		Tingkat keramaian	Lokasi strategis
		Visibilitas	1. Kondisi lokasi 2. Luas lokasi
4.	Duwit dkk (2015)	Aksesibilitas	Jarak lokasi tempat usaha dekat dengan tempat tinggal
		Keuntungan lokasi	1. Adanya penguatan kelembagaan 2. Tingginya pola pergerakan masyarakat atau pengunjung
		Retribusi	Biaya sewa tempat berjualan yang murah
		Tingkat Keramaian	Lokasi yang ramai pengunjung
5.	Nasta (2017)	Aksesibilitas	Lokasi PKL berdekatan dengan tempat tinggal
		Retribusi	Tidak adanya biaya retribusi yang dikeluarkan PKL
		Visibilitas	1. Berjualan dekat dengan jalan raya 2. Mudah terlihat
6.	Maulidiyah dan Hertari (2016)	Interaksi PKL dengan lingkungan	1. Dekat dengan kegiatan masyarakat 2. Dekat dengan permukiman penduduk 3. Dekat dengan terminal/stasiun 4. Dekat dengan kawasan aktivitas formal, seperti perkantoran,

No.	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
			pertokoan, sekolah, rumah sakit, dan jasa
		Aksesibilitas	1. Dekat dengan tempat tinggal 2. Dapat dijangkau transportasi umum 3. Memiliki akses keluar dan masuk yang lancar 4. Lahan parkir
		Retribusi	1. Harga sewa lahan/kios yang murah 2. Penarikan retribusi tambahan
		Kebutuhan Ruang untuk Berdagang	1. Jenis barang dagangan 2. Luas tempat berdagang
		Tingkat Keramaian	1. Lokasi yang ramai akan pengunjung
		Utilitas	1. Ketersediaan tempat pembuangan sampah 2. Ketersediaan drainase 3. Ketersediaan jaringan air bersih 4. Ketersediaan pelayanan jaringan listrik
7.	Rahayuni (2015)	Interaksi PKL dengan Lingkungan	1. Dekat dengan kawasan perumahan 2. Dekat dengan pusat pendidikan 3. Dekat dengan perkantoran 4. Dekat dengan pertokoan 5. Dekat dengan rumah sakit 6. Dekat dengan jasa
		Visibilitas	Kemudahan pembeli untuk mencapai lokasi
		Tingkat Keramaian	Lokasi strategis
		Utilitas	1. Ketersediaan pelayanan jaringan listrik 2. Ketersediaan pelayanan jaringan air bersih 3. Ketersediaan pelayanan pembuangan limbah/ sampah
		Aksesibilitas	1. Fungsi jalan 2. Ketersediaan angkutan umum
8.	Novelia (2015)	Tingkat keramaian	1. Lokasi strategis 2. Tingkat kunjungan tinggi
		Kebutuhan Ruang untuk Berdagang	1. Sarana berdagang 2. Luas lapak 3. Waktu pelayanan 4. Sifat pelayanan
		Interaksi PKL dengan Lingkungan	Keterkaitan dengan kegiatan formal disekitarnya

**)Hasil Pustaka, 2020*

www.itk.ac.id

Berdasarkan hasil pustaka yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapat dari beberapa pakar terkait faktor-faktor yang memengaruhi kriteria lokasi PKL yang sesuai dengan penelitian ini telah saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain, di mana yang paling banyak disepakati adalah faktor tingkat keramaian yakni disepakati oleh 7 (tujuh) pakar dan disusul dengan faktor aksesibilitas yang disepakati oleh 6 (enam) pakar. Pada faktor tingkat keramaian disepakati oleh 7 (tujuh) pakar, yaitu diantaranya Hamdan (2017), Susilo (2011), Duwit dkk (2015), Nasta (2017), Maulidiyah dan Hertiar (2016), Rahayuni (2015), dan Novelia (2015). Sedangkan, pada faktor aksesibilitas disepakati oleh 6 (enam) pakar, yaitu diantaranya Hamdan (2017), Susilo (2017), Duwit dkk (2015), har Nasta (2017), Maulidiyah (2016), dan Novelia (2015).

Pada faktor visibilitas disepakati oleh 4 (empat) pakar, yaitu diantaranya Hamdan (2017), Duwit dkk (2015), Maulidiyah (2016), dan Rahayuni (2015). Pada faktor interaksi PKL dengan lingkungannya juga disepakati oleh 4 (empat) faktor, yaitu diantaranya Hamdan (2017), Maulidiyah (2016), Rahayuni (2015), dan Novelia (2015). Selain itu juga, ada faktor retribusi disepakati oleh 4 (empat) pakar, yaitu menurut pendapat Susilo (2011), Duwit dkk (2015), Nasta (2017), dan Maulidiyah (2016). Sedangkan, pada faktor keuntungan lokasi hanya disepakati 2 (dua) pakar, yaitu menurut pendapat Susilo (2011) dan Duwit dkk (2015). Pada faktor Kebutuhan ruang untuk berdagang dan faktor utilitas hanya disepakati 2 (dua) pakar, yaitu menurut pendapat Maulidiyah (2016) dan Adinda Sukma Novelia (2015).

2.5 Sintesa Pustaka

PKL sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman yang belum terlaksana secara efisien dan belum adanya kebijakan secara resmi dalam penataannya, disisi lain Kawasan Lapangan Merdeka dan Pantai Melawai merupakan lokasi yang strategis dan harga sewa lahan yang cukup murah yang menyebabkan semakin banyaknya pedagang kaki lima untuk melakukan usaha perdagangan di sepanjang jalan tersebut. Dalam memberikan arahan kriteria relokasi PKL dibutuhkan beberapa strategi untuk menunjang rumusan dari arahan tersebut. Hasil dari sintesis teori-teori yang telah dijelaskan di atas menjadi dasar penentuan dalam memilih

variabel yang sesuai dalam arahan penentuan relokasi PKL. Sintesis teori disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Sintesa Pustaka

No.	Sasaran	Indikator	Variabel
1.	Mengidentifikasi karakteristik PKL berdasarkan kebutuhan ruang berdagang di sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman	Kebutuhan Ruang untuk Berdagang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis usaha PKL 2. Bentuk sarana fisik berdagang 3. Luas lapak usaha PKL 4. Sifat pelayanan PKL 5. Pola pelayanan PKL 6. Waktu pelayanan PKL
2.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kriteria lokasi PKL di sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman berdasarkan preferensi PKL Lapangan Merdeka dan Pantai Melawai	Aksesibilitas	Mudah dijangkau transportasi umum
		Interaksi PKL dengan Lingkungan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi keterkaitan PKL dengan kegiatan formal 2. Klasifikasi keterkaitan PKL dengan kegiatan nonformal
		Tingkat Keramaian	Klasifikasi keterkaitan PKL dengan lokasi strategis
		Retribusi	Harga sewa yang murah
		Kebutuhan Ruang untuk Berdagang	Luas lapak
3.	Mengidentifikasi kebutuhan kriteria relokasi PKL berdasarkan preferensi PKL Kawasan Lapangan Merdeka dan Pantai Melawai	Utilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi ketersediaan pelayanan jaringan listrik 2. Klasifikasi ketersediaan jaringan air bersih 3. Klasifikasi ketersediaan tempat pembuangan sampah
		Aksesibilitas	Mudah dijangkau transportasi umum
		Interaksi PKL dengan Lingkungan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi keterkaitan PKL dengan kegiatan formal 2. Klasifikasi keterkaitan PKL dengan kegiatan nonformal
		Tingkat Keramaian	Klasifikasi keterkaitan PKL dengan lokasi strategis
		Retribusi	Harga sewa yang murah
4.	Merumuskan arahan kriteria penentuan relokasi Pedagang	Kebutuhan Ruang untuk Berdagang	Luas lapak
		Utilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi ketersediaan pelayanan jaringan listrik 2. Klasifikasi ketersediaan jaringan air bersih 3. Klasifikasi ketersediaan tempat pembuangan sampah
		Output Sasaran 1, 2, dan 3	

No.	Sasaran	Indikator	Variabel
	Kaki Lima (PKL) di sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman berdasarkan preferensi PKL Kawasan Lapangan Merdeka dan Pantai Melawai		

**)Hasil Sintesa Pustaka, 2021*



www.itk.ac.id